
UPAYA PRESIDEN MOON JAE IN DALAM HUBUNGAN BILATERAL KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA MASA JABATAN 2017-2019

Anita Puspa Eviani

¹Department of International Relations, University of Slamet Riyadi(9pt)

*Email Korespondensi: anitapuspaeviani@gmail.com

Abstract (english):

This research describe and analise how The President of South Korean, Moon Jae In, actualize diplomatic relations improvement among South Korea and North Korea in the periode of 2017-2019. The relations of the two countries has been estranged since the Korean War. In the presidential election campaign, Moon Jae In, who is the son of a former refugee, promised that the unification of Korea was one of the priorities of his administration. Before this periode of years, the diplomatic relations of the two countries were estranged. This research uses international conflict theory and diplomatic theory. The purposes of this research are to find out and analise President Moon Jae In's effort to actualize reconciliation on Korean Peninsula. The method that used in this research is qualitative method by using primary and secondary data, which be elaborated in the manner of descriptive explanation. From the data that researcher attain, Korean unification policy by Moon Jae In in the periode of 2017-2019 still not optimal, because it is obstructed by the relations between North Korea and United States, also controversy related to the difference of South Korea ideology.

Keywords: Moon Jae In, Korean conflict, Korean unification

Abstrak (Bahasa):

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa perihal upaya dari Presiden Korea Selatan Moon Jae In dalam mewujudkan perbaikan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 2017-2019. Hubungan kedua Korea sendiri sudah merenggang sejak Perang Korea. Dalam kampanye pemilihan presiden, Moon Jae In yang merupakan anak mantan pengungsi menjanjikan bahwa unifikasi Korea adalah salah satu prioritas pemerintahannya. Yang waktu sebelum diangkatnya mengalami kerenggangan hubungan. Dalam penelitian ini menggunakan teori konflik internasional dan teori diplomasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis upaya Presiden Moon Jae In dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data primer maupun sekunder, yang disampaikan melalui penjabaran deskriptif. Dari data yang didapatkan peneliti tentang kebijakan unifikasi Korea oleh Moon Jae In pada tahun 2017-2019 masih belum maksimal, karena upaya yang dilakukan masih terkendala dengan hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat, serta perdebatan perbedaan ideologi dalam Korea Selatan sendiri.

Kata Kunci: Moon Jae In, konflik Korea, unifikasi Korea

Tentang Penulis:

Anita Puspa Eviani, Penulis menyelesaikan studi S-1 di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2022.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1945 Semenanjung Korea terbagi menjadi dua, hal ini bermula karena Amerika Serikat dan Uni Soviet ingin membuat wilayah ini berada dalam kekuasaan mereka (Widyaningrum, 2019). Oleh karena kepentingan dua pihak tersebut sangat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di Semenanjung Korea (Widyasari, 2012:01). Walaupun begitu, keinginan untuk melakukan unifikasi antar kedua negara ini selalu ada. Ini ditunjukkan kala Presiden Kim Dae Jung pada tahun 1998 menggagas kebijakan Sinar Matahari atau *Sunshine Policy* (Liviamanda, Hara, & Indriastuti, 2012:03). Pendekatan yang dilakukan dengan cara kerja sama ekonomi dan kemanusiaan, demi terwujudnya penyatuan Korea. Presiden Kim Dae Jung juga mengizinkan perusahaan Korea Selatan menanamkan investasi di Korea Utara. Pada masa ini juga diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk membahas unifikasi Korea (Nidia, 2017:02). Dengan adanya kebijakan ini, hubungan kedua negara inipun sempat membaik (Liviamanda et al., 2012:03). Tetapi hubungan kedua negara ini pun sempat meregang, ketika Korea Utara secara diam-diam melakukan pengembangan senjata nuklir. Kejadian inipun menyebabkan kebijakan *Sunshine Policy* sedikit melonggar (Nidia, 2017:03).

Roh Moo Hyun tetap melanjutkan kebijakan *Sunshine Policy* walau ada perbedaan dalam fokus, yaitu Roh Moo Hyun ini lebih berfokus pada kerja sama ekonomi dengan Korea Utara. Masa Roh Moo Hyun menghasilkan kebijakan pembukaan kawasan Gunung Keumkang dan Kawasan Industri Kaesong (Nidia, 2017:04). Walaupun memiliki kemajuan hubungan dalam bidang ekonomi, tetapi keinginan penyatuan Korea tetap terjadi kebuntuan (Nidia, 2017:04). Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara pun merenggang kembali kala kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak (Moren, 2013:03). Presiden Lee Myung Bak pun memilih untuk menghentikan kebijakan *Sunshine Policy* dan mengganti ke kebijakan yang lebih keras (Liviamanda et al., 2012:04). Kebijakan yang semula hanya berorientasi pada kerja sama ekonomi, sekarang lebih dihubungkan dengan pembongkaran senjata nuklir (Moren, 2013:03). Ini dilakukan untuk menekan Korea Utara (Nidia, 2017:08). Hal ini membuat Korea Utara semakin meningkatkan aksinya.

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara tetap merenggang, ketika Presiden Park Geun Hye diangkat (Anggraini, 2019:02). Presiden Park Geun Hye pun mengambil Kebijakan *Trust Building Process* guna memperbaiki hubungan kedua Korea. Kebijakan ini lebih mengedepankan penyelarasan keamanan Korea Selatan dan kerja sama ekonomi antar Korea. Dalam kebijakan ini, Korea Selatan tidak meladeni provokasi Korea Utara. Korea Selatan lebih menekan daripada menyerang (Anggraini, 2019:07). Pada tahun 2016 Presiden Park Geun Hye mengeluarkan keputusan penutupan Kawasan Industri Kaesong. Keputusan ini didasari karena Korea Utara tetap melakukan uji coba senjata nuklir dan peluncuran satelit (Zulkarni, 2018:40). Penutupan ini sebagai respon Korea Selatan, karena Korea Utara menggunakan pendapatan yang didapat dari Kawasan Daerah Kaesong untuk mendanai proyek senjata nuklir mereka. Presiden Park juga memperketat sanksi terhadap Korea Utara.

Ketegangan antar Korea pun sedikit mereda, ketika Moon Jae In terpilih menjadi presiden kesembilan belas Korea Selatan (Cheong Wa Dae, 2018:06). Dengan dipilihnya Moon Jae In ini juga membawa harapan yang baru untuk hubungan kedua Korea, karena Presiden Moon diprediksikan akan melanjutkan *Sunshine Policy* dari kebijakan terdahulunya, yang akan mengurangi ketegangan antara dua Korea (Straub, 2018:03). Moon Jae In menggunakan komunikasi dan dialog yang baik untuk proses penyatuan Korea (Suastha, 2017).

Upaya perdamaian Semenanjung Korea sangatlah penting (Aldikawati, 2015:58). Dengan upaya perdamaian ini juga bisa digunakan untuk membujuk Korea Utara untuk melakukan penghentian program pengembangan rudal, sehingga menekan ketegangan militer di Semenanjung Korea (Muhamad, 2018:09). Selain itu dengan stabilitas keamanan Semenanjung Korea yang stabil (Arjlia, 2019:13). Dalam penelitian ini akan berfokus pada

LANDASAN TEORITIK

1. Teori Konflik Internasional

Konflik internasional dapat dijelaskan melalui beberapa pandangan, mulai dari realisme, liberalisme, marxisme dan konstruktivisme. Menurut pandangan realisme bahwa hubungan internasional adalah sistem anarkis, sehingga konflik internasional terjadi karena tidak adanya otoritas yang lebih tinggi di atas negara, guna mengatur perilaku dan penegakkan perjanjian internasional (Levy, 2006:20-21). Liberalisme berpandangan bahwa konflik disebabkan oleh negara yang menjadi penghalang bagi individu untuk mengembangkan dirinya (Burchill, 2005:63). Oleh hal itulah dibutuhkan organisasi yang dapat melindungi hak-hak individu baik internasional atau dalam negeri, dan organisasi itu dapat menegakkan norma yang ada (Meiser, 2015:24).

Menurut marxisme, konflik terjadi karena kurang meratanya distribusi sumber daya dan *power*. Sumber daya diartikan sebagai kelas, status dan *power* (Dahrendorf, 2006:213). Kaum dominan akan mendapat keistimewaan dalam memperoleh sumber daya, dibanding kaum sub-dominan dalam masyarakat (Gunvald, Alf and Cox, 2013:65). Marxisme berpandangan bahwa hubungan internasional adalah bukan hanya tentang kebijakan luar negeri suatu negara atau politisi, tetapi lebih terhadap keberlangsungan hidup, produksi, teknologi, dan tenaga kerja. Kebijakan itu juga dibuat karena adanya hubungan sosial dan struktur ekonomi global (Pal, 2017:43). Marxisme juga berpandangan bahwa konsep anarkis dunia dibuat untuk dipercaya tentang mitos tentang dunia. Serta membuat kebiasaan bahwa negara adalah agen yang otonom yang perilakunya dapat diprediksikan (Pal, 2017:44).

Konstruktivisme memandang bahwa konflik dan misi perdamaian tergantung pada norma dan identitas mereka (Javadikouchaksaraei, Reevany Bustami, Fazwan Ahmad Farouk, & Akbar Ramazaniandarzi, 2015:109). Menurut Luhmann (dalam Bernshausen & Bonacker, 2019:25) ada tiga elemen dalam melihat perkembangan konflik, yaitu observasi, komunikasi, dan harapan normatif. Luhmann berpendapat bahwa konflik terjadi karena respon negatif dari komunikasi, dan aktor yang terlibat dalam konflik lebih mematuhi ekspektasinya dan harapan normatif mereka. Dengan memahami konflik yang ada, konflik yang ada dapat berubah menjadi kerja sama (Javadikouchaksaraei et al., 2015:109).

Penggunaan teori konstruktivisme juga digunakan untuk memandang kebijakan Moon Jae In dalam memandang upaya perdamaian di Korea dari presiden sebelumnya dan bagaimana dinamika konflik Korea yang terjadi. Penggunaan konstruktivisme ini yang memandang komunikasi dan harapan normatif, sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Moon Jae In. Moon Jae In menggunakan komunikasi untuk membangun identitas bersama, yaitu dengan menggunakan diplomasi. Selain itu dengan memberikan harapan normatif agar Korea Utara juga bisa merealisasikan perdamaian di Semenanjung Korea secara bersama-sama.

2. Teori Diplomasi

Menurut Bolewski (2007:15), diplomasi adalah praktik sebagai seni dan kerajinan dalam berkomunikasi dan pertukaran antara negara-negara yang bertindak melalui perwakilan mereka untuk kepentingan nasional (seperti politik, ekonomi, ilmiah, sosial dan lainnya) dengan cara yang damai. Menurut konstruktivis, diplomasi sudah tertanam dalam praktik sosial, karena diplomasi dan masyarakat internasional sudah menyatu dalam sistem umum atau moral dan hukum yang ada (Jonsson & Hall, 2005:22). Konstruktivisme berpandangan bahwa kepentingan nasional berasal

dari gagasan dan identitas yang terbentuk, ketika interaksi suatu negara dengan negara lain. Hasil dari interaksi sosial antar negara ini seperti kepentingan nasional, identitas negara, dan *power status* yang harus memiliki sifat *intersubjective* (Prabhu & Mohapatra, 2014:230). Untuk menilai *power* sendiri menurut Josep Nye (dalam Cho, 2012:278) dibagi menjadi tiga, yaitu *hard power*, *soft power* dan *smart power*. Berikut adalah pendekatan-pendekatan diplomasi dan *power* :

a. *Hard diplomacy*

Dalam *hard diplomacy* lebih menekankan untuk pertemuan atau dialog antar pemerintahan yang bersangkutan, yang diwakili oleh kepala negara dan bersifat tingkat tinggi dan tertutup (Cho, 2012:276). Dalam pelaksanaan *hard diplomacy* lebih mementingkan pencapaian yang didapatkan secara cepat, walaupun dalam pencapaian harus melalui paksaan atau ancaman.

b. *Soft diplomacy*

Pelaksanaan *soft diplomacy* lebih bersifat lunak dan terbuka (Cho, 2012:276). Dalam *soft power* sendiri memfokuskan pada opini publik yang didupakannya. Negara yang bisa mempengaruhi negara lain bukan dengan membatasi opini publik, tetapi dapat memanfaatkan opini publik yang sebaik-baiknya (Cho, 2012:276). Oleh karena itulah dalam pelaksanaannya *soft diplomacy* tidak bisa hanya melibatkan aktor negara saja, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lainnya (Cho, 2012:276).

Menurut Nye, dalam pendekatan *soft diplomacy* tidak hanya menggunakan pengaruhnya dalam bidang politik militer atau kekuatan ekonomi saja (Nye, 2008:95). Tetapi *soft power* menekankan penggunaan pendekatan dalam bidang budaya, kebijakan pemerintah yang mendorong *soft power*, dan kebijakan domestik maupun luar negeri tentang opini publik (Nye, 2008:94). Sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Nye, McClory berpendapat bahwa dalam *soft power* terdapat lima kategori yang mendukungnya, yaitu kebudayaan, diplomasi, pendidikan, dan bisnis atau inovasi (dalam Raimzhanova, 2015:08).

Walaupun pendekatan yang digunakan lebih luas daripada *hard power*, tetapi pencapaian yang dihasilkan oleh *soft power* tidak bisa secepat *hard power*. Ini terjadi karena dalam *soft diplomacy* berfokus terhadap visi dan misi jangka yang panjang, sehingga untuk mendapatkan pencapaian yang diinginkan diperlukan jangka waktu yang panjang. (Raimzhanova, 2015:13).

c. *Smart Diplomacy*

Smart power sendiri dikenalkan oleh Joseph S Nye dalam penelitiannya tahun 2008, yang memiliki arti kombinasi dari *hard power* dan *soft power* guna mencapai sebuah tujuan dalam hubungan internasional (dalam Cho, 2012:278). Dalam penerapan *smart diplomacy* atau yang juga disebut *smart power diplomacy* terdapat tiga pendekatan, yaitu kemampuan digital, *stakeholder diplomacy*, dan *feminist diplomacy*.

Dalam pendekatan kemampuan digital ini, negara dan afiliasinya dapat menggunakan saluran digital ini untuk mempengaruhi publik tentang kebijakan-kebijakan yang dibuatnya (Global Diplomatic Forum, 2016).

Walau dalam beberapa negara *stakeholder* pasti dikaitkan bagian dari negara, tetapi dalam perkembangannya tumbuh *stakeholder-stakeholder* independen. Ini disebabkan karena aktor-aktor selain negara juga memiliki kepentingan global (Global Diplomatic Forum, 2016). *Stackholder* independen ini seperti organisasi-organisasi non pemerintah,

perusahaan swasta, amal, akademisi, dan seniman (Global Diplomatic Forum, 2016).

Tidak hanya pendekatan digital dan *stakeholder* saja, dalam *smart diplomacy* juga terdapat *feminist diplomacy*. Walaupun diplomasi ini belum populer seperti dua pendekatan yang lain. Tetapi diplomasi ini mulai diikuti oleh beberapa negara. Dalam diplomasi ini berpandangan bahwa urusan global tidak hanya menjadi urusan kaum pria saja, tetapi kaum wanita juga terlibat dalamnya. (Global Diplomatic Forum, 2016).

Dari tiga konsep di atas, peneliti akan menggunakan konsep *smart diplomacy* untuk mengkaji isu tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Moon Jae In untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Penggunaan konsep ini paling sesuai dengan upaya Moon Jae In, karena konsep ini menggabungkan antara konsep *hard diplomacy* dan *soft diplomacy*. Selain itu, dalam konsep *smart diplomacy* ini terdapat pendekatan *stakeholder* dalam pelaksanaannya. Yang hal ini juga digunakan oleh Moon Jae In dalam melakukan pendekatan yang dilakukannya dengan Korea Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan narasi atau analitis, dan lebih menekankan detail pada kasus yang diteliti (Klotz & Prakash, 2008:211). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam data primer menggunakan sumber data dari *press release* Pemerintah Korea Selatan dan website resmi Blue House. Untuk data sekunder, peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari buku, jurnal, dokumen dan artikel media massa yang memiliki kesesuaian tema dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan jurnal dan website media massa yang kredibel sebagai penunjang data dalam penelitian ini. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah upaya yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In untuk perdamaian Semenanjung Korea dalam masa jabatan 2017-2019.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Unifikasi Korea

Sejak dalam kepemimpinan Kekaisaran Jepang pada tahun 1905, Bangsa Korea telah berbagi sejarah menjadi komunitas dengan kesamaan leluhur dan homogenitas budaya selama lebih dari seribu tahun. Tetapi ketika pendudukan Jepang berakhir, Semenanjung Korea pun segera dipecah menjadi dua zona. Zona utara yang dipimpin oleh Uni Soviet dan zona selatan yang dikelola oleh Amerika Serikat (Ha & Jang, 2016:111). Hal ini pun mengakibatkan terbentuknya identitas baru di Semenanjung Korea, yaitu dengan identitas anti-kapitalis dan anti-imperialis di Korea Utara dan anti-komunis di Korea Selatan (Bleiker, 2004:36). Pada masa ini sering disebut masa Perang Dingin dan bipolarisasi dalam hubungan internasional. Keinginan untuk menyatukan pemerintahan Korea yang tunggal tetap ada. Keinginan unifikasi ini mendorong Korea Utara menyerang Korea Selatan pada tahun 1950, dan menyebabkan pecahnya Perang Korea. Tapi keinginan itu tidak berhasil, karena perbedaan ideologis yang ada (Bennett, 2018:01). Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara ini, menimbulkan penguatan identitas anti-komunis di Korea Selatan (Ha & Jang, 2016:111).

Tahun 1984, Korea Utara diketahui mulai mengembangkan rudalnya, untuk informasi rudal sendiri Korea Utara tidak memberikan informasi. Sehingga peneliti internasional menamai menurut tempat pengujian rudal tersebut, yaitu Desa No-dong, Taepo-dong, Musudan dan tempat pengembangan balistik di Tonghae (Nuclear Threat Initiative, 2017). Korea Utara juga menyetujui Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) dengan International Atomic Energy Agency (IAEA). Tetapi kebijakan itu tidak diteruskan oleh Korea Utara (Davenport, 2020). Tahun 1987, Roh Tae Woo dipilih menjadi presiden Korea Selatan. Roh

Tae Woo memiliki kebijakan Nordpolitik yang digunakan untuk menormalisasi hubungan dengan negara-negara komunis (Sangkeun & Chung-in, 2016:226). Kebijakan ini juga berdampak baik untuk hubungan kedua Korea. Masa ini kedua Korea membuka hubungan dagang antar Korea yang sempat ditutup (Sangkeun & Chung-in, 2016:227). Kedua Korea juga menyepakati denuklirisasi, walaupun dalam implementasi belum dilaksanakan (Nuclear Threat Initiative, 2018). Tetapi hubungan ini tidak lama, karena Roh Tae Woo diganti dengan Kim Yong Sam. Hubungan kedua Korea pun mulai memanas kembali (Axelblom, 2017:05).

Hubungan kedua Korea pun mulai membaik ketika kepemimpinan Kim Dae Kung. Kim Dae Jung sendiri memiliki kebijakan unifikasi yang bernama *Sunshine Policy* (Son, 2004:03). Kebijakan ini memperbolehkan untuk warga Korea Selatan berkontak dengan warga Korea Utara di daerah DMZ untuk memberikan bantuan pangan, serta masa ini Grup Hyundai mulai membuka tur Gunung Keumkang. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) juga diadakan saat itu (Wertz, 2017:03).

Kebijakan inipun diteruskan oleh Roh Moo Hyun, walapun ada perbedaan fokus dan nama yang diganti menjadi *'Policy for Peace and Prosperity'*. Roh Moo Hyun menginsentifkan bantuan kemanusiaan dan investasi. Walaupun akhirnya kebijakan ini terhambat krisis nuklir yang terjadi saat itu (Wertz, 2017:03). Serta adanya penolakan dari kelompok anti-komunis di Korea Selatan, yang menanggapi kebijakan ini melanggengkan perilaku pelanggaran norma internasional Korea Utara (Son, 2004:03).

Hubungan kedua Korea pun memburuk, ketika kepemimpinan Lee Myung Bak. Lee Myung bak merasa bahwa kebijakan Sunshine Policy lebih menguntungkan Korea Utara. Yang akhirnya Lee Myung bak mencetuskan kebijakan *'Vision 3000: Denuclearization and Openness'*, dalam kebijakan ini Korea Selatan akan membantu Korea Utara untuk menaikkan pendapatan perkapitanya menjadi US\$3000 selama sepuluh tahun dengan syarat Korea Utara harus melakukan denuklirisasi. Masa ini Korea Selatan sangat menanggapi konfrontasi Korea Utara (Hong & Cho, 2017:60-61). Korea Selatan pun saat itu lebih fokus terhadap identitas Korea Selatan yang lebih mengglobal, dibandingkan dengan identitas Korea Bersama (John, 2015:39).

Hubungan kedua Korea tetap memanas, ketika Park Geun Hye mulai memimpin. Park Geun Hye pun sejak kampanye menjanjikan program unifikasi (Wertz, 2017:05). Program ini dituliskannya dalam artikel di majalah Foreign Affairs yang berjudul *'A New Kind of Korea Building Trust Between Seoul and Pyongyang'*. Dalam artikel ini menekankan pada Korea Utara untuk menjaga kesepakatan terhadap Korea Selatan dan komunitas internasional (Geun-hye, 2011:14), serta menekankan konsekuensi terhadap tindakan pelanggaran perdamaian. Kebijakan ini pun dikenal dengan kebijakan *"trust building process"*.

Park Geun Hye memiliki pandangan bahwa unifikasi adalah *"daebak"* atau dalam Bahasa Indonesia yang berarti suatu keberuntungan (Snyder, 2016:105). Ini digunakan untuk memikat generasi muda untuk memandang bahwa unifikasi adalah keberuntungan dalam bidang ekonomi (Snyder, 2016:106). Ditahun 2016 hubungan kedua Korea memanas, (Cheong Wa Dae, 2017) untuk mempertegas sanksi kepada Korea Utara (Wertz, 2017:06).

Berikut adalah tabel yang menjelaskan perihal kebijakan unifikasi Korea Selatan sejak kepemimpinan Kim Dae Jung sampai Presiden Park Geun Hye.

Tabel 1. Kebijakan Unifikasi Korea

Masa Pemerintahan	Nama Kebijakan	Fokus Kebijakan
Kim Dae Jung (1998-2003)	<i>Sunshine Policy</i>	Mengembangkan hubungan yang positif antar Korea
Roh Moo Hyun (2003-2008)	<i>Policy for Peace and Prosperity</i>	Menginsentifkan hubungan kedua Korea
Lee Myung Bak (2008-2012)	<i>Vision 3000: Denuclearization and Openness</i>	Denuklirisasi Korea Utara
Park Geun Hye (2012-2016)	<i>Trustpolitik</i>	Penyelarasan hubungan kedua Korea dan internasional

Sumber : dari berbagai sumber

2. Upaya Unifikasi Korea Masa Presiden Moon Jae In

Setelah lengsernya Park Geun Hye karena kasus suapnya, diadakanlah pemilihan umum ditahun 2017 yang kemudian memenangkan Moon Jae In (Cheong Wa Dae, 2018:06). Dalam pdato pelantikannya Moon Jae In akan memprioritaskan stabilitas di Semenanjung Korea, yang akan dimasukkan dalam kebijakan ‘100 Policy Task Five Years Plan of The Moon Jae In Administration’ (Cheong Wa Dae, 2017:17).

Kebijakan inipun tertuang dalam webiste Kementerian Unifikasi Korea (www.unikorea.go.kr), yang dalam kebijakan ini didasari oleh *peace first, spirit of ‘mutual respect’*, dan *‘open policy’*. Ini dimaksudkan bahwa perdamaian digunakan untuk kemakmuran bersama tanpa adanya keruntuhan salah satu pihak dengan partisipasi publik dalam perdamaian Korea (Ministry of Unification, 2017). Dalam website juga menampilkan empat strategi yang akan ditempuh oleh Moon Jae In, yaitu mengambil pendekatan langkah-demi-langkah dan komprehensif, menangani masalah hubungan antar Korea dan ancaman nuklir Korea Utara secara bersamaan, memastikan keberlanjutan melalui institusionalisasi, meletakkan landasan untuk unifikasi damai melalui kerja sama yang saling menguntungkan (Ministry of Unification, 2017).

Pelaksanaan kebijakan ini ditunjukkan dengan pengiriman beberapa utusan untuk membahas perdamaian di Semenanjung Korea ke Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia (Cheong Wa Dae, 2018:29). Dibeberapa pidato Moon Jae In diberbagai acara internasional pada tahun 2017 yang terang-terangan mengajak Korea Utara untuk ikut berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 yang diadakan di Pyeongchang, Korea Selatan. Dalam pertemuannya dengan Donald Trump yang diadakan di Seoul, Moon Jae In juga membujuk Korea Utara untuk mau berdiskusi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat (U.S Embassy and Consulate in the Republic of Korea, 2017).

Bujukan itu akhirnya diterima oleh Kim Jong Un dengan mengutus delegasi Korea Utara pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, serta mau ikut dalam dialog untuk membahas peningkatan relasi antar Korea. Dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 ini, Korea Utara bergabung dalam satu tim hoki perempuan dan bergabung mengibarkan bendera unifikasi saat acara pembukaan olimpiade ini (2018 Inter-Korean Summit Preparation Committee, 2018:05). Pada olimpiade ini, Moon Jae In bertemu dengan Kim Yo Jong dan petinggi partai pekerja Korea Utara. Pertemuan ini membahas perihal

kemauan Korea Utara untuk berdialog dengan Amerika Serikat (2018 Inter-Korean Summit Preparation Committee, 2018:05).

Setelah acara olimpiade ini, kedua Korea melakukan pertemuan-pertemuan secara intens. Selain itu diadakan konser pertukaran kebudayaan, dengan 120 artis Kpop dan atlet taekwondo Korea Selatan untuk tampil di Pyeongyang pada 03 April 2018 (2018 Inter-Korean Summit Preparation Committee, 2018:05). Ditanggal 27 April 2017 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Antar Korea yang diadakan di Panmunjeom yang menghasilkan deklarasi *Panmunjeom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula*. Yang berisi (Cheong Wa Dae, 2018?:35):

1. Kedua belah pihak akan menghubungkan kembali hubungan darah bangsa dan memajukan kemakmuran bersama dan unifikasi independen yang dipimpin oleh orang Korea dengan mencapai peningkatan dan pengembangan yang komprehensif dan penting dalam hubungan antar-Korea.
2. Kedua belah pihak akan melakukan upaya bersama untuk meredakan ketegangan militer akut dan menghilangkan bahaya perang di Semenanjung Korea.
3. Kedua belah pihak akan secara aktif bekerja sama untuk membangun perdamaian yang permanen dan menciptakan rezim yang stabil di Semenanjung Korea (Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, 2018).

Dalam pertemuan ini juga membahas perihal bergabungnya beberapa tim cabang olahraga kedua Korea di Asian Games 2018 yang diadakan di Jakarta (Sunghee, 2018). Setelah KTT ini, Moon Jae In bertemu dengan Donald Trump. Dalam pertemuan ini Donald Trump mengumkann akan bertemu dengan Kim Jong Un di Singapura pada tanggal 12 Juni 2018 (BBC.com, 2018b). Moon Jae In dan Kim Jong Un sendiri mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas perihal infrastruktur yang dibutuhkan untuk unifikasi (BBC.com, 2018a).

Donald Trump dan Kim Jong Un pun melakukan pertemuan di Singapura pada bulan Juni 2018, di Vietnam pada Februari 2019, dan di zona demiliterisasi pada bulan Juni 2019. Ketiga pertemuan ini membahas perihal denuklirisasi Korea Utara dan sanksi yang diterima oleh Korea Utara (Panda, 2020). Tetapi ketiga pertemuan ini tidak menemukan titik temu, karena perbedaan pendapat perihal sanksi yang diterima Korea Utara (Aljazeera, 2020). Mengetahui tidak adanya titik temu dalam dialog yang dilakukan oleh Donald Trump dan Kim Jong Un, Moon Jae In berusaha membujuk Donald Trump untuk mengurangi sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB mengenai nuklir Korea Utara. Moon Jae In juga grup kerja antara Korea Selatan dan Amerika Serikat guna membahas kerjasama mengenai isu Korea Utara, termasuk implementasi dan mematuhi dari sanksi yang diberikan oleh PBB perihal denuklirisasi (Davenport, 2020).

Hubungan kedua Korea mendingin ditahun 2019, Karena Moon Jae In tidak membuk aakses Gunung Keumkang. Hal ini didasari karena sanksi internasional tidak memperbolehkan Korea Utara mendapatkan pendapatan dari investasi luar (Hancocks, 2019). Blue House sendiri juga menyadari bahwa sanksi di internasional juga menghambat dalam perdamaian di Semenanjung Korea (DePetris, 2020).

Tabel 1. Dialog Antar Korea

Bidang yang dibahas	2017	2018	2019
Politik	0	19	0
Militer	0	4	0
Ekonomi	0	4	0
Isu kemanusiaan	0	2	0
Sosial dan Budaya	0	7	0

Total	0	36	0
-------	---	----	---

Sumber : Ministry of Unification (2020)

3. Upaya Pembangunan Identitas Bersama Masa Moon Jae In

Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara sangatlah kompleks. Jika pun ada tujuan untuk melakukan unifikasi, tujuan itu tidak akan bisa mendekatkan hubungan keduanya seperti sebelum pemisahan. Pemerintah Korea Selatan telah melakukan serangkaian opsi kebijakan unifikasi, walaupun yang terjadi sering kebijakan tersebut tidak berlanjut dan sering berganti setiap bergantinya presiden. Hal ini diharapkan menjadi pemimpin Korea Selatan yang membuka jalan unifikasi, inipun terjadi dalam pandangan Moon Jae In (Jiyoon, Friedhoff, Chungku, & Euicheol, 2015:07).

Dalam pemerintahan Moon Jae In sendiri kebijakan unifikasi juga menjadi kebijakan prioritas (Cheong Wa Dae, 2017:17). Moon Jae In ingin menjadikan Korea Utara sebagai mitra dalam mencapai kemakmuran bersama, tanpa melihat perbedaan identitas ideologi kedua Korea (Cheong Wa Dae, 2018:22). Dalam pandangan konstruktivis sendiri, konflik dan misi perdamaian tergantung pada norma dan identitas mereka (Javadikouchaksaraei et al., 2015:109). Hal ini disadari oleh Moon Jae In. Moon Jae In yang dulu pernah menjadi staf Roh Moo Hyun dalam mengurus unifikasi Korea merasakan bagaimana perbedaan ideologi dan perilaku menjadi penghambat dalam unifikasi (Son, 2004:03). Ini membuat Moon Jae In mengambil keputusan bahwa negosiasi dan sanksi tetap dilaksanakan (Cheong Wa Dae, 2017:16).

Menurut Luhmann (dalam Bernshausen & Bonacker, 2019:25) untuk melihat perkembangan sebuah konflik dapat dilihat melalui tiga elemen, yaitu observasi, komunikasi, dan harapan normatif. Ini pun dilakukan oleh Moon Jae In, ia merasa bahwa penggunaan *soft diplomacy* atau *hard diplomacy* tidak cukup, harus ada sinergitas di dalamnya dengan *smart diplomacy*. Penggunaan *soft diplomacy* dilaksanakan dengan ajakan untuk ikut berkontribusi dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dan Asian Games 2018. Selain itu dilaksanakan juga konser pertukaran kebudayaan antar kedua Korea. Penggunaan *hard diplomacy* oleh Korea Selatan ditunjukkan dengan pertemuan representatif Korea Selatan ingin membahas perihal nuklir Korea Utara, walau akhirnya diprotes oleh representatif Korea Utara. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak membahas perihal pembukaan hubungan militer antar kedua Korea dan perwakilan Korea Utara pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang (Davenport, 2020). Untuk pembahasan lebih lanjut perihal nuklir sendiri, Moon Jae In lebih berpandangan bahwa penyelesaian nuklir mempererat aliansi dengan Amerika Serikat dan kerja sama internasional dan Korea Selatan sebagai mediator (Sean, 2020).

Kedua pemimpin Korea akhirnya bertemu di Panmunjeom. Dalam pertemuan tingkat tinggi dihasilkanlah *Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula*. Deklarasi ini berisikan tiga poin, yaitu memperbaiki hubungan darah dari Bangsa Korea dan kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea, dan menciptakan rezim yang stabil di Semenanjung Korea (Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, 2018:02-06).

Dalam poin pertama deklarasi ini, kedua pemimpin ini berharap bahwa akan adanya pembentukan identitas baru dengan perbaikan hubungan darah Bangsa Korea (Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, 2018:02-03). Selain itu dalam unifikasi Korea didasari keinginan bangsa Korea dengan dipimpin oleh orang Korea Sendiri. Bangsa Korea yang homogen harus berpisah setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang di Korea. Yang menyebabkan dibagi dua zona di Semenanjung Korea, zona utara dipimpin oleh Uni Soviet dan zona selatan dikelola oleh Amerika Serikat pada kala itu (Ha & Jang, 2016:111).

Dalam poin dua dalam Deklarasi Panmunjeom, kedua Korea ingin menurunkan tensi militer dan bahaya dari perang di Semenanjung Korea. Kedua pemimpin ini sepakat untuk mengurangi ketegangan militer dan menghilangkan bahaya perang, karena ini terkait dengan

nasib bangsa dan stabilitas kehidupan orang Korea (Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, 2018:03). Hal ini berkaitan dengan Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953, yang mengakibatkan lima juta warga sipil meninggal dunia. Kedua pemimpin ini membahas juga perihal penghentian propaganda pengeras suara kedua belah pihak di zona demiliterisasi (Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, 2018:04).

Dalam poin ketiga dari Deklarasi Panmunjeom membahas bagaimana kedua pihak akan membangun rezim perdamaian yang stabil dan permanen di Semenanjung Korea. Untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea, kedua belah pihak menegaskan kembali perjanjian non-agresi. Kedua belah pihak juga setuju untuk melakukan pelucutan senjata secara bertahap, dan melakukan peringatan ke 65 tahun Perjanjian Gencatan Senjata. Serta melakukan hubungan trilateral dengan Amerika Serikat dan akan mengadakan pertemuan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mengganti Perjanjian Gencatan Senjata menjadi perjanjian perdamaian (Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, 2018:04-05).

Ditahun 2018 sendiri, kedua pemimpin Korea mengadakan Untuk pertemuan yang kedua diadakan pada bulan Mei 2018 yang membahas perihal infrastruktur saat unifikasi (BBC.com, 2018a). Kemudian pertemuan ketiga diadakan di Pyongyang pada bulan Agustus 2018, pada pertemuan ini keduanya membahas perihal pembukaan kembali kawasan Gunung Keumkang dan kawasan industri Kaesong (Hancocks, 2019). Tapi karena sanksi yang diterima oleh Korea Utara membuat pembukaan kawasan industri Kaesong dan daerah pariwisata Gunung Keumkang tidak terealisasi. Walaupun Korea Selatan sudah mendorong agar Amerika Serikat untuk melonggarkan sanksi dari Amerika Serikat maupun Dewan Keamanan PBB (Sean, 2020).

Hubungan kedua Korea pun mulai meregang, ketika ketiga pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump tidak menemukan titik temu. Hal ini berimbas berhentinya perundingan antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 2019 (Ministry of Unification, 2020). Korea Utara pun mulai mengancam akan mengembangkan kembali senjata nuklir miliknya. Korea Utara juga akan memberikan 'kado' ke Amerika Serikat dan sekutunya, karena matinya perundingan keduanya (Hancocks, 2019).

Kepercayaan Kim Jong Un ke Moon Jae In pun mulai berkurang, Kim Jong Un memandang kalau Moon Jae In kurang berpihak ke Korea Utara (Hancocks, 2019). Serta lebih memihak ke Amerika Serikat. Moon Jae In juga dinilai tidak berhasil untuk membujuk Donald Trump untuk berlaku lebih lembut ke Korea Utara. Ini mengakibatkan Korea Utara tidak mau mendengarkan lagi Korea Selatan, yang mengakibatkan renggangnya hubungan kedua Korea hingga saat ini (Hancocks, 2019).

Moon Jae In pun mendapatkan imbas dari matinya perundingan ini, yaitu berkurangnya dukungan ke dirinya. Selain karena hal tersebut, skandal dari pemerintahannya semakin mendorong berkurangnya dukungan atas dirinya (Jervis, 2019). Pihak oposisi pun menganggap bahwa kebijakan yang diambil oleh Moon Jae In sama dengan mempromosikan ideologi komunis di Korea Selatan (Sungku, 2020). Tingkat kepercayaan publik Korea Selatan ke Kim Jong Un sendiri sangat tinggi 80%, karena sopan santun Kim Jong Un terhadap Moon Jae In (Kong, 2018). Walaupun begitu tingkat ketidakpercayaan publik Korea Selatan perihal denuklirisasi yang akan dilakukan Korea Utara juga tetap tinggi, yaitu 64,1% (Wooyoung, 2018).

SIMPULAN

Kesimpulan analisis penulis bahwa perbaikan hubungan kedua Korea pada masa pemerintahan Moon Jae In pada tahun 2017-2019 masih belum maksimal, karena terkendala dari faktor internal maupun eksternal. Dalam faktor internal sendiri, Korea Selatan masih terganjal perbedaan dari ideologi yang ada dan kurangnya pembahasan kebijakan perihal nuklir Korea Utara dalam masa kepemimpinan Moon Jae In ini. Untuk faktor eksternal sendiri, Korea Selatan masih terhalang tidak adanya titik temu dalam penerapan sanksi yang

diperoleh Korea Utara pada pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un, serta ketidak adanya kelonggaran dalam penerapan sanksi internasional yang juga menghambat unifikasi Korea.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bolewski, W. (2007). *Diplomacy and International Law in Globalized Relations* (1st ed.). Retrieved from <http://libgen.is/book/index.php?md5=2CEDFA9856713CACE46ABD18885DF870>
- Jonsson, C., & Hall, M. (2005). *Essence of Diplomacy* (1st ed.; G. . Berridge, Ed.). Retrieved from http://93.174.95.29/_ads/C7168859E824D07F47FE48FD1CF87D11
- Klotz, A., & Prakash, D. (2008). *Qualitative Methods in International Relations*. <https://doi.org/10.1057/9780230584129>
- Levy, J. S. (2006). International Sources of Interstate and Intrastate War. In C. A. Crocker, F. O. Hampson, & P. All, *Leashing The Dogs Of War Conflict Management in a Divided World* (pp. 17-38). Washington D.C: United States Institute Of Peace Press.
- Pal, M. (2017). Marxism. In S. McGlinchey, R. Walters, & C. Scheinplug, *International Relation of Theories* (pp. 42-48). Bristol: E-International Relations

Jurnal

- Aldikawati, M. (2015). MASA DEPAN REUNIFIKASI KOREA (Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin). *Universitas 17 Agustus 1945*, 33–61. Retrieved from <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/download/63/45>
- Anggraini, S. A. (2019). Motivasi Park Geun-Hye Menerapkan Kebijakan Trust Politic Dalam Menghadapi Korea Utara Pada Tahun 2013-2016. *Universitas Riau*, 6, 1–9. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/23129/22394>
- Axelblom, A. (2017). Republic of Korea ' s Sunshine Policy : The sweeping fall in support for the Sunshine Policy and the role of the Ministry of Unification during the tumultuous Sunshine years. Centre for East and South-East Asian Studies.
- Bennett, B. (2018). Alternative Paths to Korean Unification. In *Alternative Paths to Korean Unification*. <https://doi.org/10.7249/rr2808>
- Bernshausen, S., & Bonacker, T. (2019). A Constructivist Perspective on Systemic Conflict Transformation. *The Non-Linearity of Peace Processes*, 23–38. <https://doi.org/10.2307/j.ctvbkjz66.5>
- Bleiker, R. (2004). Identity, Difference, And The Dilemmas Of Inter-Korean Relations: Insights From Northern Defectors And The German Precedent. *Asian Perspective*, 28(2), 35–63. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/42704453> Accessed:
- Cho, Y. Y. (2012). Public Diplomacy and South Korea ' s Strategies. *Chung-Ang University*, 10(2), 275–296.
- Dahrendorf, R. (2006). Conflict and Critical Theories. Corwin, 211–241. Retrieved from https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/13636_Chapter7.pdf
- Gunvald, Alf and Cox, L. (2013). Marxism and Social Movements. In C. Barker, L. Cox, J. Krinsky, & A. G. Nielsen (Eds.), *Socialist Studies/Études Socialistes* (Vol. 11). <https://doi.org/10.18740/s47603>
- Ha, S. E., & Jang, S. J. (2016). National identity in a divided nation: South Koreans' attitudes toward North Korean defectors and the reunification of two Koreas. *International Journal of Intercultural Relations*, 55, 109–119. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.10.003>

- Hong, S. H., & Cho, Y. Y. (2017). Consistent pattern of DPRK's policy on ROK: What shapes North Korea's foreign policy? *International Area Studies Review*, 20(1), 57–75. <https://doi.org/10.1177/2233865916683602>
- Javadikouchaksaraei, M., Reevany Bustami, M., Fazwan Ahmad Farouk, A., & Akbar Ramazaniandarzi, A. (2015). Reinterpreting the israeli-palestinian conflict: A constructivism theory of understanding a cross-ethnic phenomena. *Asian Social Science*, 11(16), 107–113. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n16p107>
- Jiyoon, K., Friedhoff, K., Chungku, K., & Euicheol, L. (2015). South Korean Attitudes toward North Korea and Reunification. The Asan Institute for Policy Studies.
- John, J. V. (2015). Globalization, national identity and foreign policy: Understanding “Global Korea.” *Copenhagen Journal of Asian Studies*, 33(2), 38–57. <https://doi.org/10.22439/cjas.v33i2.4965>
- Liviamanda, D., Hara, A. E., & Indriastuti, S. (2012). KEPUTUSAN KOREA UTARA MEMBATALKAN UPAYA REUNIFIKASI (NORTH KOREA ' S DECISION TO CANCEL EFFORTS THE KOREAN REUNIFICATION). Universitas Jember. Retrieved from https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13139/DebyLiviamanda-080910101003_1.pdf?sequence=1
- Moren, R. G. . (2013). Reaksi Korea Utara Terhadap Kebijakan Korea Selatan Memberhentikan Bantuan Ekonomi Terhadap Korea Utara (2008- 2011). *Universitas Riau*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Muhamad, S. V. (2018). Perdamaian di semenanjung korea pasca-pertemuan moon jae-in dan kim jong un. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, X, 7–12. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X-9-I-P3DI-Mei-2018-183.pdf
- Nidia, D. N. (2017). Sunshine Policy Pada Masa Pemerintahan President Lee Myung Bak. Universitas Muhamaddyah Yogyakarta. Retrieved from http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12157/K_NASKAH_PUBLIKASI.pdf?sequence=11&isAllowed=y
- Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Prabhu, S. S., & Mohapatra, N. (2014). Reconstructing India ' s Identity in World Politics : An Emerging Convergence between Public Diplomacy and Constructivism Relations : a Reality Check. 2(6), 227–231.
- Raimzhanova, A. (2015). Power in RI: Hard, Soft and Smart power. The Annual Conference on Cultural Diplomacy 2015, (December), 1–20. Retrieved from http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf
- Sangkeun, L., & Chung-in, M. (2016). South Korea ' s Economic Engagement toward North Korea. Joint U.S.-Korea Academic Studies On.
- Snyder, S. (2016). South Korean Identity Under Park Geun-hye: Crosscurrents & Choppy Waters. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*, 27, 103–112.
- Son, K.-Y. (2004). South Korean Identities in Strategies of Engagement with North Korea : A Case Study of President Kim Dae-jung's Sunshine Policy. I(June).
- Straub, D. (2018). South Korea's Diplomatic Options Under Moon Jae-in. Korean Economic Institute. Retrieved from http://www.keia.org/sites/default/files/publications/jukas_chapter_1_intro.pdf
- Wertz, D. (2017). Inter-Korean Relations. The National Committee On North Korea, (January).
- Widyaningrum, G. L. (2019). Ketika Perang Dingin Memecah Korea Menjadi Dua. *National Geographic*, pp. 1–5. Retrieved from
-

-
- <https://nationalgeographic.grid.id/read/131637707/ketika-perang-dingin-memecah-korea-menjadi-dua?page=all> 2/5
- Pemerintah Korea Selatan
- 2018 Inter-Korean Summit Preparation Committee. (2018). 2018 Inter-Korean Summit. Retrieved from <http://www.koreasummit.kr/Summit2018/Performance>
- Cheong Wa Dae. (2017). 100 Policy Task Five-year plan of this Moon Jae-in Administration. 1(4), 53. Retrieved from <https://english1.president.go.kr/dn/5af107425ff0d>
- Cheong Wa Dae. (2018). Moon Jae-in President Of The Republic Of Korea. Retrieved from http://www.korea.net/FILE/pdfdata/2017/11/MoonJae-inPresidentoftheRepublicofKorea_en_1113.pdf
- Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea. (2018). Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula. Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, 14916(September). Retrieved from http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1&titleNm=
- Ministry of Unification. (2017). Moon Jae-in's Policy on the Korean Peninsula. Retrieved April 20, 2020, from https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/strategies/
- Ministry of Unification. (2020). Inter-Korean Dialogue. Retrieved April 21, 2020, from Ministry Of Unification website: https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/statistics/dialogue/
- Berita Online
- Aljazeera. (2020). South Korea's Moon: "Desperate need" to improve North Korea ties. *Aljazeera*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2020/01/south-korea-moon-desperate-improve-north-korea-ties-200107020137522.html>
- BBC.com. (2018a). Korean leaders meet in surprise summit. BBC.Com. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-44265287>
- BBC.com. (2018b). Trump says summit with North Korea's Kim Jong-un may be delayed. BBC.Com. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-44207986>
- Geun-hye, P. (2011). A New Kind of Korea: Building Trust Between Seoul and Pyongyang. *Foreign Affairs*, 90(5), 13–18. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/885101328/abstract%5Cnhttp://search.proquest.com/docview/885101328/fulltext?accountid=15179>
- Hancocks, P. (2019). Why North Korea wants nothing to do with South Korea - CNN. Cnn, pp. 1–6. Retrieved from <https://www.cnn.com/2019/12/19/asia/north-korea-south-korea-intl-hnk/index.html>
- Jervis, J. (2019). South Korean Moon's Mid-Term Review. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2019/06/south-korean-president-moons-mid-term-review/>
- Kong, K. (2018). Nearly 80 Percent of South Koreans Say They Trust Kim Jong Un, Poll Finds. *Time*. Retrieved from <https://time.com/5262437/kim-jong-un-trust-south-korea-poll/>
- Panda, A. (2020). Trump-Kim Relationship No Longer Sufficient for US-North Korea Diplomacy: NK Official A senior North Korean official indicated that the U.S. would "never" get an offer like what it received in Hanoi in February 2019. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2020/01/trump-kim-relationship-no-longer-sufficient-for-us-north-korea-diplomacy-nk-official/>
- Sean, L. (2020). Moon Jae-in Holds on to His Dream of North Korea. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2020/06/moon-jae-in-holds-on-to-his-dream-of-north-korea-diplomacy/>
-

- Suastha, R. D. (2017, November 9). Moon Jae-in , Dulu Anak Pengungsi Korut Kini Presiden. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171109094213-113-254496/moon-jae-in-dulu-anak-pengungsi-korut-kini-presiden-korsel/1/5>
- Sunghhee, H. (2018, April). Asian Games could have 7 joint Korean teams : Seoul official. *The Jakarta Post*, pp. 1–6. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/30/asian-games-could-have-7-joint-korean-teams-seoul-official.htm>
- Sungku, J. (2020). Why President Moon Jae-In’s Electoral Success Harms South Korean Interests. *The National Interest*. Retrieved from <https://nationalinterest.org/blog/korea-watch/why-president-moon-jae-ins-electoral-success-harms-south-korean-interests-148566>
- Wooyoung, L. (2018). Polls show South Koreans do not trust North’s “sincerity.” *Aljazeera*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2018/03/polls-show-south-koreans-trust-north-sincerity-180314072728180.html>
- Website
- Davenport, K. (2020). Chronology of U.S-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy. Retrieved July 16, 2020, from Arms Control Association website: <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>
- DePetris, D. R. (2020). Moon Jae-in Wants Peace with North Korea. There’s Just One Problem. *The National Interest*. Retrieved from <https://nationalinterest.org/blog/korea-watch/moon-jae-wants-peace-north-korea-theres-just-one-problem-11165>
- Global Diplomatic Forum. (2016). *Smart Diplomacy: The Future of Diplomatic Undertaking*. (November), 1–3. Retrieved from <https://static1.squarespace.com/static/52c8df77e4b0d4d2bd039977/t/5811f31ce3df282037ae2ca7/1477571356986/Smart+Diplomacy+2016-+Programme.pdf>
- Nuclear Threat Initiative. (2018). North Korea Nuclear. Retrieved July 28, 2020, from Nuclear Threat Initiative website: <https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/>
- U.S Embassy and Consulate in the Republic of Korea. (2017). *Remarks by President Trump and ROK President Moon in Joint Press Conference*. Retrieved from <https://kr.usembassy.gov/110717-remarks-president-trump-rok-president-moon-joint-press-conference/>

Skripsi

- Arjlia, A. (2019). Kepentingan korea selatan dalam deklarasi panmunjom pada masa pemerintahan moon jae in skripsi. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. Retrieved from digilib.uinsby.ac.id
- Widyasari, L. (2012). Dinamika Hubungan Korea Selatan-Korea Utara dalam Mewujudkan Reunifikasi di Semenanjung Korea Periode 2003-2008. 1–20. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24166/1/LILIS.pdf>
- Zulkarni, Z. (2018). PARK GEUN HYE MENGENAI A . Trust-Building Process. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 32–50. Retrieved from [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22011/7%29%20BAB III.pdf?sequence=8&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22011/7%29%20BAB%20III.pdf?sequence=8&isAllowed=y)